

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Isu-isu dan kebijakan politik sangat menentukan perilaku pemilih, tapi terdapat pula sejumlah faktor penting lainnya. Sekelompok orang bisa saja memilih sebuah partai politik karena dianggap sebagai representasi dari agama atau keyakinannya, tetapi kelompok yang lain memilih karena partai politik tertentu dianggap representasi dari kelas sosialnya. Ada juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada partai atau figur tokoh tertentu.

Terlepas dari tujuan suatu partai politik, satu hal telah pasti. Mereka membutuhkan suara para pemilih agar bisa berkiprah di dalam dunia politik. Untuk itu, mereka harus memahami pemilih. Tanpa pemahaman ini, mereka tidak akan diterima oleh masyarakat, sehingga artinya gagal untuk menyelenggarakan tujuan mereka berkiprah di politik. Sejatinya, suatu partai politik harus berusaha memahami pemilih mereka. Sejumlah hal perlu diketahui, terutama yang menyangkut perilaku pemilih sebagai konsumen politik dalam memberikan suara atau mendukung suatu partai politik tertentu.

Masa demokratisasi sekarang ini, hubungan antara kontestan dengan pemilih adalah hubungan yang tidak stabil, karena semakin kritisnya masyarakat dan semakin lunturnya ikatan tradisional maupun primordial. Kontestan tidak akan bisa memenangkan persaingan politik tanpa mendapatkan dukungan pemilih. Tentunya tidak mengherankan apabila menjelang pemilu, kontestan beramai-ramai mendekati pemilih untuk memberikan suaranya. Hubungan pasif seperti ini, seperti yang telah diungkapkan, membuat pemilih menjadi objek politik.

Keberadaan pemilih seharusnya dijadikan subjek dan kontestan sebaiknya menempatkan diri sebagai pelayan serta agen pembaharuan dalam masyarakat. Pada kenyataannya, hubungan antara kontestan dengan pemilih begitu kerap dengan pengkhianatan. Setelah memenangkan pemilu, mudah sekali kontestan melupakan janji dan harapan politik yang telah mereka wacanakan di hadapan para pemilih. Mereka sangat sibuk mengurus berbagai macam hal tentang distribusi kekuasaan untuk mengamankan posisi yang telah didapat.

Pemilih juga seringkali memindahkan dukungan mereka dari satu kontestan ke kontestan lain. Semakin meningkatnya massa mengambang dan non-partisan, harus disadari bahwa ikatan ideologi yang dulu sangat kuat itu sekarang telah luntur. Pemilih semakin hari menjadi sangat kritis dan selalu mengevaluasi apa saja yang telah dilakukan kontestan pemenang pemilu. Mereka melihat bahwa program kerja yang dilaksanakan kontestan pemenang pemilu ternyata tidak sesuai dengan janji mereka ketika kampanye pemilu, pemilih dapat menghukum kontestan dengan tidak memilihnya kembali pada pemilu berikutnya.

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan tersebut (Firmanzah, 2008:87). Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik.

Partai politik harus memiliki basis pendukung yang memiliki kesamaan ideologi dan tujuan politik. Kelompok-kelompok pendukung atau konstituen ini secara jelas mendefinisikan keterikatan mereka dengan partai politik tertentu. Kelompok masyarakat ini adalah para pendukung atau konstituen suatu partai politik di lingkungan internal atau konstituen dan pendukung pesaing-pesaing di lingkungan eksternal. Selain itu, pemilih merupakan bagian masyarakat luas yang bisa saja tidak menjadi konstituen partai politik tertentu.

Masyarakat terdiri dari beragam kelompok. Terdapat kelompok masyarakat yang memang non-partisan, dimana ideologi dan tujuan politik mereka tidak diikatkan kepada suatu partai politik tertentu. Mereka menunggu sampai ada suatu partai politik yang bisa menawarkan program kerja yang terbaik menurut mereka, sehingga partai tersebutlah yang akan mereka pilih.

Pemilihan Umum di Indonesia merupakan sarana penyaluran aspirasi yang paling efektif ditengah kondisi masyarakat yang sulit untuk menyalurkan aspirasinya. Partai politik yang salah satu fungsinya sebagai sarana untuk

menyalurkan aspirasi justru belum menunjukkan fungsi yang sebenarnya, partai politik di Indonesia cenderung disibukan dengan bagaimana caranya agar mendapatkan suara yang banyak dalam pemilu. Seiring dengan bergulirnya waktu, pemilihan umum pun mengalami fase perubahan, sejak pasca kemerdekaan sampai dengan masa sekarang.

Setelah orde baru reformasi kehidupan politik di Indonesia banyak mengalami perubahan dan keterbukaan. Rakyat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan politik di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Makna dari “Kedaulatan berada ditangan rakyat” dalam hal ini adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan dalam mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengisi jalannya pemerintahan.

Perwujudan kedaulatan rakyat yang dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui azas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

Setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Untuk melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Saat pemilih memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun.

Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Pada penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan manapun.

Pemilu legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 lalu dilaksanakan serentak di seluruh wilayah NKRI diikuti oleh 44 partai politik peserta pemilu. Salah satu diantaranya adalah Partai Keadilan Sejahtera,

dimana partai yang dipimpin oleh Ir.Tifatul Sembiring ini pada pemilu tersebut secara nasional mampu menunjukkan grafik peningkatan dalam hal dukungan pemilih. Hasilnya Partai Keadilan Sejahtera masuk dalam jajaran empat partai besar pemenang pemilu setelah Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai politik sebagai salah satu variabel penting dalam proses pemilu, dimana mereka adalah peserta pemilu. Wakil rakyat yang nantinya akan dipilih untuk mewakili rakyat dalam legislatif harus dipilih melalui kendaraan partai politik.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu 2009 secara nasional mampu memperoleh suara sebesar 8.325.020 (7,88%), dimana pada pemilu 2004 hanya mampu memperoleh suara sebanyak 8.206.955 (7,34 %). Artinya pada pemilu 2009 dukungan pemilih terhadap PKS meningkat 0,54 % dari pemilu sebelumnya.

Hasil akhirnya setelah penghitungan suara selesai dan berdasarkan pada keputusan Komisi Pemilihan Umum, PKS masuk dalam empat besar partai pemenang pemilu pada pemilu legislatif 2009 setelah Demokrat dengan perolehan suara 21.703.137 (20,85%), Golkar mendapatkan 15.037.757 (14,45%) suara dan PDI-P memperoleh 14.600.091 (14,03%) suara dan tentunya mereka semua secara otomatis lolos ke senayan.

Dua partai yang mengalami kenaikan pada pemilu legislatif 2009 adalah Partai Keadilan Sejahtera (0,54 %) dan Partai Demokrat (13,40 %), sementara yang mengalami penurunan suara atau turunnya dukungan pemilih adalah Partai Golkar (7,13 %) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (4,50 %). Data

perolehan suara hasil pemilu legislatif 2009 secara nasional tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Data Perbandingan Perolehan Suara Pemilu Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tingkat Nasional

No	Partai Politik	Jumlah suara		Persentase		Keterangan
		2004	2009	2004	2009	
1	Demokrat	8.455.225	21.703.137	7,45 %	20,85%	Naik 13,40 %
2	Golkar	24.480.757	15.037.757	21,58 %	14,45%	Turun 7,13 %
3	PDI-P	21.026.629	14.600.091	18,53 %	14,03%	Turun 4,50 %
<b>4</b>	<b>PKS</b>	<b>8.206.955</b>	<b>8.325.020</b>	<b>7,34 %</b>	<b>7,88 %</b>	<b>Naik 0,54 %</b>

Sumber : KPU Pusat

Kenaikan Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera secara Nasional tidak diimbangi oleh perolehan suaranya di Provinsi Lampung yang pada pemilu legislatif 2009 mengalami penurunan suara sebanyak 20,68 % suara. Pemilu Tahun 2004 Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung memperoleh suara sebanyak 282.927 dan pada pemilu 2009 mengalami penurunan menjadi 255.057 suara.

Terinci dari data yang tersaji pada tabel 2, dari sepuluh Kabupaten/Kota yang ada di Lampung lima daerah diantaranya mengalami penurunan perolehan suara dalam pemilu legislatif 2009, daerah tersebut antara lain (1) Kota Bandar Lampung turun menjadi 7,17 % suara, (2) Tanggamus menurun 6,60 % suara, (3) Lampung Timur menurun 1,30 % suara, (4) Lampung Utara menurun 5,39 % suara, (5) termasuk Kota Metro menurun 0,22 % suara, namun lima daerah lainnya mengalami kenaikan suara pada pemilu 2009 tersebut.

Partai Keadilan Sejahtera Kota Metro dari pemilu 2004 ke pemilu 2009 tercatat tidak pernah menyentuh angka dukungan suara sebanyak minimal 10.000 suara, sehingga Kota Metro selalu memiliki perolehan suara terendah dibandingkan sembilan kepengurusan PKS di Kabupaten/Kota lain. Namun PKS Kota Metro berhasil mencatatkan penurunan dukungan suara terendah 0,22 % suara dibandingkan PKS di sembilan Kabupaten/Kota yang lain. Data perbandingan perolehan suara pemilu tersebut tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2. Data Perbandingan Perolehan Suara Pemilu Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tingkat Provinsi Lampung

No	DPD PKS	Perolehan Suara		Persentase		Keterangan
		2004	2009	2004	2009	
1	Bandar Lampung	65.466	40.727	23,13 %	15,96 %	Turun 7,17 %
2	Lampung Selatan	47.177	55.890	16,67 %	21,91 %	Naik 5,24 %
3	Tanggamus	32.531	12.493	11,49 %	4,89 %	Turun 6,60 %
4	Lampung Timur	31.770	25.315	11,22 %	9,92 %	Turun 1,30 %
5	Lampung Tengah	31.362	54.199	11,08 %	21,24 %	Naik 10,16 %
6	Lampung Utara	30.332	13.619	10,72 %	5,33 %	Turun 5,39 %
7	Tulang Bawang	18.813	26.122	6,64 %	10,24 %	Naik 3,60 %
8	Lampung Barat	10.210	11.202	3,60 %	4,39 %	Naik 0,79 %
9	Way Kanan	10.190	11.474	3,60 %	4,49 %	Naik 0,89 %
10	Metro	5.076	4.016	1,79 %	1,57 %	Turun 0,22 %
	<b>Total</b>	<b>282.927</b>	<b>255.057</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>Turun 20,68 %</b>

Sumber : DPW PKS Lampung dan data diolah

Peneliti mengambil Partai Keadilan Sejahtera Kota Metro untuk dijadikan objek dalam penelitian ini. Sementara itu yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah dukungan pemilihnya dikarenakan dari pemilu 2004 ke pemilu 2009 dukungan pemilih terhadap Partai Keadilan Sejahtera Kota Metro mengalami penurunan perolehan suara. Total jumlah dukungan pemilih pada Tahun 2004 sebanyak 5.076 suara dan pada pemilu berikutnya Tahun 2009 Partai Keadilan Sejahtera hanya mampu meraih suara sebanyak 4.016, artinya terjadi penurunan suara sebanyak 0,22 %.



Tabel 3. Data Perbandingan Perolehan Suara Pemilu Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Metro

No	Kecamatan	Perolehan Suara		Persentase		Keterangan
		2004	2009	2004	2009	
1	Metro Pusat	1.895	1.492	37,33 %	37,15 %	Turun 0,18 %
2	Metro Utara	604	776	11,89 %	19,32 %	Naik 7,43 %
3	Metro Timur	1.406	1.000	27,69 %	24,90 %	Turun 2,87 %
4	Metro Barat	757	506	14,91 %	12,59 %	Turun 2,40 %
5	Metro Selatan	414	242	8,15 %	6,02 %	Turun 2,20 %
	<b>Total</b>	<b>5.076</b>	<b>4.016</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>Turun 0,22 %</b>
<b>Catatan : * Suara Partai Keadilan (PK) Tahun 1999 = 1.659 suara</b>						

Sumber : DPD PKS Kota Metro dan data diolah

Data diatas memberikan gambaran bahwa telah terjadi penurunan yang cukup signifikan yang terjadi pada Partai Keadilan Sejahtera Kota Metro dalam hal perolehan suara pada pemilu legislatif 2009. Hal ini tentunya terinci di dalam tabel 1 diatas, dimana Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif 2009 lalu partai tersebut menjadi salah satu bagian kontestan di Kota Metro.

Pada pemilu 2009 Kota Metro dibagi menjadi tiga daerah pemilihan (DP). Daerah pemilihan I yaitu meliputi Kecamatan Metro Pusat dan Metro Utara, Daerah Pemilihan II meliputi Kecamatan Metro Timur dan Daerah Pemilihan III meliputi Kecamatan Metro Barat dan Metro Selatan.

Partai Keadilan Sejahtera di DP I Metro Pusat dan Metro Utara pada pemilu legislatif 2009 hanya berhasil memperoleh suara sebanyak 2.268. Perolehan suara pemilu pada tahun ini menurun dibandingkan pemilu tahun 2004 dimana PKS mampu mendulang suara hingga 2.499. Artinya pada DP I telah terjadi penurunan dukungan pemilih sebesar 0,18 % suara.

Kecamatan Metro Pusat yang terdiri dari lima kelurahan, empat diantaranya mengalami penurunan suara yakni Kelurahan Metro, Hadimulyo Barat, Hadimulyo Timur dan Yosomulyo, sedangkan Kelurahan Imopuro yang memang menjadi basis simpatisan PKS mengalami kenaikan dalam perolehan suara. Sedangkan di Kecamatan Metro Utara dari empat kelurahan yang ada, hanya kelurahan Karangrejo saja yang mengalami penurunan perolehan suara. Kelurahan Banjarsari, Purwosari dan Purwoasri mengalami kenaikan.

Daerah Pemilihan II Kecamatan Metro Timur yang terdiri dari lima kelurahan, hanya kelurahan Tejosari saja yang mengalami peningkatan perolehan suara, sedangkan empat kelurahan lainnya seperti Tejo Agung, Iring Mulyo, Yosodadi dan Yosorejo mengalami penurunan. DP II pada pemilu 2004 memperoleh 1.406 Suara, namun pada pemilu 2009 turun 2,87 % suara menjadi 1.000 suara.

Yang lebih menjadi sorotan tajam adalah DP III Kecamatan Metro Barat dan Metro Selatan, dari empat kelurahan yang ada di Metro Selatan semuanya mengalami penurunan suara, sedangkan di Kecamatan Metro Barat dari empat kelurahan hanya kelurahan Ganjar Agung saja yang mengalami peningkatan suara pada pemilu tahun ini, tiga kelurahan lainnya seperti Kelurahan Ganjar Asri, Mulyojati dan Mulyo Asri semuanya mengalami penurunan.

Tercatat bahwa di DP III pada pemilu kali ini terjadi penurunan sebesar 4,60 % suara, dengan perolehan suara tahun 2004 sebesar 1.171 suara dan pemilu 2009 menurun menjadi 748 suara. Kesimpulannya dari ketiga daerah pemilihan di Kota Metro yang mengalami penurunan suara terbanyak adalah DP III

dengan total penurunan 4,60 % suara, disusul DP II sebanyak 2,87 % suara dan kemudian DP I sebanyak 0,18 % suara.

Fokus penelitian diarahkan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana dukungan pemilih yang dilakukan oleh pemilih dalam memutuskan diri untuk aktif terlibat dalam pemilu legislatif 2009 dengan memilih Partai Keadilan Sejahtera di Kota Metro, peneliti juga ingin mengetahui penyebab dan latar belakang turunnya dukungan pemilih terhadap Partai Keadilan Sejahtera Kota Metro pada pemilu tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Dukungan Pemilih Terhadap Partai Keadilan Sejahtera Kota Metro ?
2. Analisis Penyebab dan Latar Belakang Turunnya Dukungan Pemilih Terhadap Partai Keadilan Sejahtera Kota Metro.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui dukungan pemilih terhadap Partai Keadilan Sejahtera Kota Metro.

2. Untuk mengetahui penyebab dan latar belakang apa sehingga terjadi penurunan dukungan pemilih terhadap Partai Keadilan Sejahtera Kota Metro.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara akademis, hasil dari penelitian diharapkan dapat membantu memberikan alternatif informasi, bahan referensi, serta sebagai sumber informasi awal bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik dengan Analisis Dukungan Pemilih Terhadap Partai Keadilan Sejahtera Kota Metro.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi partai-partai politik dalam memperoleh dukungan pemilih.